

**MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA TASIK SERAI BARAT
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014**

Oleh :

Azwir Syahputra

Email : az_wyr@yahoo.co.id

Pembimbing : Mayarni, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The program implementation of rural infrastructure strengthen refers to aid program that is given by Bengkalis regency government to all villages in Bengkalis regency to increase the quality of rural infrastructure. The aims of this program are to increase donation and the basic infrastructure needs of rural society through program of society endeavoring but in reality get many deviations of rural infrastructure foundation. It is caused of foundation control lacking. The aims of this research is to know and analyze management implementation of infrastructure strengthening program in West Tasik Serai Pinggir subdistrict Bengkalis regency on 2014. The basic theory was management that included planning, organization, implementation and supervisor. In analyzing the data the researcher used George R. Terry theory. This research was qualitative that focus on descriptive. In collecting the data, the writer used interview, observation, and documentation. This research used key informers as the information sources triangulasi technique as the sources in data validity testing. After doing this research, the writer found that the implementation management of strengthen program of rural infrastructure was not good. There was many deviations in the implementation of local society organization formation (OMS) and also untranfaransi of cost planning calculation (RAB). Besides that there are factors that influenced management implementation like lack of workers (OMS), there was effort and mutual cooperation from society, untranfaransi of cost planning calculation (RAB) in the implementation management of strengthen program of rural infrastructure

Keyword : Management, Implementation, society empowerment.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan pembangunan di Indonesia yang salah satu tujuan pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu prioritas yang penting bagi suatu Negara, baik Negara maju maupun Negara yang sedang berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai usaha dan upaya untuk mewujudkannya. Berbagai bentuk ide-ide direalisasikan pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan pegawai atau aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan disegala bidang. Peranan pegawai atau aparatur negara sangat dituntut didalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkisenambungan baik material maupun spiritual.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa era dan otonomi daerah telah memberikan peluang dan ruang gerak bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat (lokal) dalam

menjalankan pembangunan di daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini ditegaskan bahwa otonomi daerah melalui UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten Kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh daerah dan urusan apa tidak dapat dikerjakan oleh daerah, ada dua jenis urusan didalam undang-undang ini yang dapat dikerjakan oleh daerah, yang pertama adalah urusan wajib yang merupakan urusan yang wajib dikerjakan oleh setiap daerah seperti yang tertera pada pasal 14 ayat (1), urusan wajib tersebut meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat,
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. Penanganan bidang kesehatan,
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia Potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten kota,
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah Termasuk lintas kabupaten/ kota

- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten kota,
- l. Pelayanan kependudukan dan, catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota,
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota,
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan (INBUB-PPIP) tahun 2014 di Kabupaten Bengkalis, mencanangkan sebuah program yang di tujukan untuk membiayai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur perdesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini di harapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif yakni pemerintahan desa dan masyarakat untuk dapat merencanakan dan melaksanakan program penguatan infrastruktur perdesaan sesuai dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan yang ada guna pemerataan dan percepatan pembangunan di perdesaan,

khususnya dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Tujuan lain program PPIP ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja, serta membangun kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan di desa masing-masing. Lewat program PPIP ini pula semangat gotongroyong dan swadaya yang selama ini di gelorakan oleh para pendahulu bisa terus terjaga, sebab dana INBUB-PPIP itu masyarakat yang langsung mengelola, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengawasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Desa Tasik Serai Barat juga merupakan desa yang mendapatkan alokasi dana tersebut. Di desa Tasik Serai Barat ini mendapatkan pembiayaan alokasi dana PPIP sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), hal ini dikarenakan Desa Tasik Serai Barat adalah merupakan Desa pemekaran dari Desa Tasik Serai yang merupakan Desa induk, oleh karena itu sistem pengalokasian dana PPIP disesuaikan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 160/KPTS/IV/2014 tentang penetapan alokasi dana PPIP tahun 2014. Dana tersebut di pergunakan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu meliputi: pembangunan jalan lingkungan, bodijalan, semenisasi, pembangunan tanggul/turap, dwiker/goronggorong, jembatan.

Program PPIP yang di canangkan oleh Bupati Bengkalis pada tahun 2014 yang lalu, pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat bagus dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Tasik

Serai Barat, bantuan infrastruktur tersebut dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis diserahkan melalui Pemerintah Desa/ OMS.

Penyediaan sarana prasarana melalui PPIP tersebut menerapkan pendekatan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan PPIP di Desa Tasik Serai Barat dinilai sedang dan output sarana prasarana PPIP yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan belum terwujud, masyarakat masih perlu arahan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Program yang di harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan di desa Tasik Serai Barat di bidang infrastruktur pembangunan, pada hasil akhirnya menuai hasil yang kurang memuaskan karena ada fenomena yang penulis temukan yang tidak sesuai dengan dilapangan yang akan peneliti lakukan penelitian lebih lanjut dalam proses pelaksanaan program PPIP tersebut, yaitu antara lain :

1. Tidak sesuainya jumlah anggota pelaksana PPIP yang dijalankan oleh OMS, dibagian anggota terjadi kekosongan jabatan satu orang, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam tupoksinya. Sebagaimana dijelaskan pada peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Bengkalis bagian ketiga pada pasal 8 ayat 7.

2. Tidak adanya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Manajemen Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis Tahun 2014”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis.

Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk:
 - 1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Administrasi Publik.
 - 2) Dapat berguna sebagai referensi dan rekomendasi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian lanjutan.
- b. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi organisasi terkait, dalam hal

ini khususnya adalah kabupaten Bengkalis sebagai masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan untuk tahun berikutnya.

KONSEP TEORI

Dalam rangka teori ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas. **G.R Terry (2006:4)**, dalam teorinya menyatakan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Yang dilakukan untuk menentukan saran-saran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Menurut **George R.Terry** dalam **Manullang (2012:8)**, prinsip-prinsip manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.

Suatu perencanaan yang baik, haruslah mengandung formulasi 5W + 1H yaitu *What* (apa), *Who* (siapa), *Where* (dimana), *When* (kapan), *Why* (mengapa), *How* (bagaimana). Disamping itu perencanaan yang baik

haruslah terdapat unsur-unsur yaitu adanya penyusunan rencana kerja dan penerapan tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Didalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu adanya perincian kerja, penempatan dan pembagian tugas.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut **Badrudin (2015:152)**, Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanan atau penggerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya :

- a. Kepemimpinan
- b. Motivasi dan
- c. Komunikasi

3. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut **G.R Terry** dalam **Syafie (2006:50)**, Pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya

berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. pengawasan dan Pe-ngendalian. Tidak saja berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu pembangunan perumahan itu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini proses pengawasan ada tiga tahap yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian diskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori, yaitu tentang manajemen pelaksanaan program penguatan infrastruktur

perdesaan di desa tasik serai barat kecamatan pinggir kabupaten bengkalis tahun 2014.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tasik Serai Barat.

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat atau keadaan kelembagaan, masyarakat. Informan penelitian menggunakan metode *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. *Key informan* adalah Kepala Desa Tasik Serai Barat, BPD, informan lainnya adalah Organisasi Masyarakat Setempat.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data mengenai tentang manajemen Pelaksanaan program penguatan infrastruktur perdesaan yang diperoleh secara langsung dari informen. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi langsung mengenai tentang manajemen pelaksanaan program penguatan infrastruktur perdesaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang dapat

menunjukkan objek yang di teliti berupa:

1. keadaan geografis di provinsi riau
2. struktur kantor desa tasik serai barat
3. literatur – literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, skripsi, dan tesis serta informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Metode pengambilan data adalah tatancara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari objek penelitian. untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu;

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informen yang berhubungan dengan penelitian, baik secara struktur maupun tidak terstruktur guna untuk mendapat informasi yang di inginkan oleh peneliti.

2. Obsarvarsi

Peneliti mengamati lapangan, yaitu turun secara langsung kelapangan untuk mengetahui atau mengamati gejala-gejala apa yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Merupakan studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui catatan, arsip yang ada pada kantor Kepala Desa Tasik Serai Barat. Guna untuk mendapatkan informasi untuk hasil penelitian penulis. Dokumentasi dilakukan dengan pihak Desa Tasik Serai Barat.

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan

teknik diskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklafikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian mearik kesimpulan untuk menentukan hasil berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan terdapat empat fungsi manajemen, Menurut **George R.Terry** dalam **Manullang (2012:8)**, yaitu

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah pembangunan infrastruktur di Desa Tasik Serai Barat. Kemampuan dalam melakukan sebuah perencanaan pada awal tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola program itu sendiri mengenai tujuan dan sasaran yang akan diperoleh. Sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting yang positif bagi pengelola dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

a. Penetapan tujuan

Didalam penetapan tujuan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang berdasarkan peraturan bupati digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan penguatan infrastruktur perdesaan. Perencanaan dalam melaksanakan pembangunan penguatan infrastruktur perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah Desa yang diwujudkan dalam perencanaan awal Desa. Kemampuan dalam melakukan perencanaan awal tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola program itu sendiri mengenai tujuan dan sasaran yang akan diperoleh. Sebab perencanaan awal akan memberikan kontribusi yang positif bagi pengelola dalam mewujudkan tujuan programnya. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan penguatan infrastruktur perdesaan perencanaan awal sangat penting untuk dilakukan. Perkembangan sebuah program diawali dengan rencana, baik oleh pengurus yakni sebagai penanggung jawab yaitu Kepala Desa, pengawas yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sebagai Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), kegiatan perencanaan awal diantaranya adalah penetapan tujuan sebuah program dalam hal ini program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok atau kelompok organisasi. Secara umum batasan

pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah (organisasi) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

tugas pokok dan fungsi (Tufoksi), yaitu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat yang mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah oleh warga masyarakat untuk warga masyarakat itu sendiri, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut Kepala Desa beserta Pendamping Desa menempatkan diri pada posisi sebagai pembina dan motivasi warga masyarakat sehingga warga masyarakat mempunyai kepedulian sosial, berpartisipasi dan mempunyai peran aktif terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini OMS selaku koordinator yang mengatur tugas dan membagi kerja antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan penguatan infrastruktur perdesaan dalam pembagian tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah dilakukan dengan baik dengan dibentuknya penempatan dan pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan pembagian tugas didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pengurus. Pengorganisasian dilakukan agar setiap anggota tau dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penempatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahliannya dan

kemampuannya dengan begitu tujuan dapat tercapai secara maksimal, dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan penguatan infrastruktur perdesaan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras. Untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dari pihak pimpinan atau juga sebagai usaha untuk mengarahkan anggota operasi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. *Actuating* merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan baik dan benar.

Pemerintahan Desa Tasik Serai Barat, pergerakan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dapat melakukan tugas-tugasnya secara optimal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini pergerakan dilakukan adalah khusus pelaksana pembangun penguatan infrastruktur perdesaan. Kegiatan pelaksanaan yang baik diharapkan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan.

4. pengawasan

Pengawasan merupakan upaya kontrol, evaluasi dan *monitoring* terhadap sumber daya manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan dan kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi, semua fungsi yang sebelumnya tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pengelolaan pengawasan terhadap organisasi tersebut.

Untuk menjamin hasil akhir dari pembangunan sesuai atau tidak dengan rencana awal yang diajukan, PJ Kepala Desa Tasik Serai Barat yang berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, antara lain : BPD dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Pembentukan tim ini untuk melakukan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian analisis berdasarkan temuan-temuan dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Manajemen pelaksanaan program penguatan infrastruktur perdesaan telah dilaksanakan dengan baik pada setiap tahapannya, meskipun masih ada beberapa kendala dan masalah didalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut terletak pada

kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang terlibat, sehingga terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi. Miskomunikasi dan mispersepsi tersebut mengakibatkan : tidak terlibatnya masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan, serta belum optimalnya harapan yang diinginkan didalam program ini.

- b. Manajemen pelaksanaan program penguatan infrastruktur perdesaan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yaitu mulai masalah dari kurangnya anggota OMS yang melaksanakan pembangunan, tidak adanya publikasi rancangan anggaran biaya (RAB) yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang anggaran pembangunan yang akan direalisasikan serta tidak adanya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dalam manajemen pelaksanaan program penguatan infrastruktur perdesaan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, maka penulis akan memberikan sebuah masukan untuk mengevaluasi

dari hasil pelaksanaan dalam sebuah saran sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengevaluasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan mengenai masalah kecukupan jumlah anggota Pelaksana INBUP-PPIP yang dijalankan oleh Organisasi Masyarakat Setempat dan masalah penggantian apabila ada anggota yang mengundurkan diri siapa yang berhak menggantikannya dan siapa yang berhak memilih penggantinya agar lebih jelas maka harus di buat didalam Peraturan.
- b. Untuk Pemerintahan Desa Tasik Serai Barat yaitu PJ Kepala Desa Tasik Serai Barat, BPD Desa Tasik Serai Barat, dan Organisasi masyarakat Setempat (OMS), diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dan lancar dalam berkoordinasi, hal ini penting untuk menjaga terlaksananya program penguatan infrastruktur perdesaan yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Alfabeta : Bandung.
- Ardianto, Harun Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Badrudin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. PTIK Press & Restu Agung : Jakarta.
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administasi Pembangunan*. Ar-Ruzz Media : Jogjakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajer Dasar, Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung : Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. BPFE : Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. BPFE : Yogyakarta.
- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. Alfabeta : Bandung.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM : Yogyakarta.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. UGM : Yogyakarta.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Pengenalannya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategi Organisasi Non-Propit Bidang Pemerintahan*. UGM : Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Direksi Cipta : Jakarta.

- Prijono, Onny S dan A. M. W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*. CSIS : Jakarta.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta : Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Siswanto, HR. 2005. *Pengantar manajemen*. Ikrar Mandiri Abadi : Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- _____ 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Gaya Media : Yogyakarta.
- Suyato, M. 2007. *Strategic Management Global*. Yogyakarta.
- Syafiie, K. Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Terry, G.R. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Trijono, Lambing. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. PT. Alumni : Bandung.
- Yahya, Yohannes, 2006. *Pengantar Manajemen*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sumber-sumber lain :

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.